Jurnal Ilmu Pendidikan (SOKO GURU)
Vol. 5 No. 1 April 2025
ISSN: 2827-8836 (cetak), ISSN: 2827-8844 (Online), Hal 13-23
DOI: https://doi.org/10.55606/sokoguru.v5i1.5000
Available online at; https://journalshub.org/index.php/sokoguru

KEBIJAKAN PENGADAAN GURU MASA ORDE BARU : PENGARUHNYA TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DAN KEGURUAN DI INDONESIA

Adrian Farsyah
Universitas Negeri Jakarta, Indonesia
Alamat : JL. Rawamangun Muka Raya No. 11, RT 11, RW 14, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13220.
Korespondensi penulis : Farsyahhaddad@gmail.com

Abstract : *The New Order was an era of development and progress in Indonesia led by President Soeharto. The high need for teaching staff to achieve the goal of equitable education became a serious problem in the midst of the high illiteracy rate of Indonesian society at that time. Teacher procurement is a crucial solution to create and map competent and qualified teaching staff in Indonesia. This study aims to identify and analyse the teacher procurement system during the New Order era and its influence on the current education and teaching system in Indonesia. The data obtained is secondary data derived from various written sources which are then reviewed by using literature study techniques and analysed qualitatively. The results showed that the procurement of teachers during the New Order era had a significant influence on the education system and implementation in Indonesia from time to time, especially on the current teacher education system in Indonesia, which is commonly known as the Teacher Professional Education (PPG) programme. This has a positive impact on the Indonesian education system in order to provide a much higher quality education for Indonesia's younger generation.*
Keywords : *New Order; Teacher Procurement; Education System.*

Abstrak : Orde Baru merupakan era pembangunan dan perkembangan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Tingginya kebutuhan akan tenaga pengajar guna mencapai tujuan pemerataan pendidikan menjadi sebuah permasalahan serius di tengah kondisi tingginya angka buta huruf masyarakat Indonesia kala itu. Pengadaan guru menjadi sebuah solusi krusial untuk menciptakan dan memetakan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pengadaan guru pada masa orde baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia saat ini. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai macam sumber tertulis yang kemudian dikaji menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan guru pada masa orde baru memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, khususnya pada sistem keguruan di Indonesia saat ini yang umumnya dikenal dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Hal ini memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan Indonesia agar dapat memberikan pendidikan yang jauh lebih berkualitas bagi generasi muda Indonesia.
Kata Kunci : *Orde Baru; Pengadaan Guru; Sistem Pendidikan.*

LATAR BELAKANG

Pengadaan guru pada masa orde baru di Indonesia merupakan katalisator utama dalam reformasi sistem pendidikan yang memiliki dampak signifikan hingga saat ini. Pengadaan ini dilakukan guna menekan angka buta huruf serta peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan jumlah dan distribusi guru. Bjork (2015) menyatakan bahwa selama orde baru, pemerintah Indonesia berfokus pada konsolidasi birokrasi pendidikan dan memperkenalkan program pelatihan masif untuk meningkatkan kompetensi guru. Program ini termasuk pendirian Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang secara konsisten ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengajar yang kompeten (Oktaviani, 2015). Kebijakan ini memperoleh hasil yang memuaskan, dimana terjadi lonjakan pada jumlah guru kompeten yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan. Namun, seiring

Revised: March18, 2025; Accepted: March08, 2025; Online Available; April 09, 2025; Published: April 14, 2025.
*Adrian Farsyah; Farsyahhaddad@gmail.com

berjalannya waktu, reformasi yang dijalankan turut mengundang tantangan baru bagi keberlangsungan pelaksanaan program ini, khususnya dalam hal kualitas distribusi dan supervisi guru, hal ini sebagaimana dicatat oleh Datumula (2020), dirinya mencatat bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sehingga, secara tersirat meskipun pengadaan guru pada masa orde baru mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan, akan tetapi isu mengenai kualitas dan efektivitas distribusi pengajaran masih perlu dibenahi.

Lebih lanjut, kebijakan pengadaan guru pada masa orde baru turut memberikan pengaruh berkelanjutan terhadap sistem pendidikan saat ini, terutama jika dikaitkan dalam konteks struktur kelembagaan dan metode pengajaran. Ningrum (2023) menyoroti kebijakan tersebut, bahwa meski bersifat sentralistik hal ini memungkinkan adanya standarisasi kurikulum yang menjadi fondasi sistem pendidikan saat ini, hal tersebut sebagaimana didukung oleh Bjork (2005) yang menyatakan bahwa sentralisasi ini memungkinkan pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas kurikulum dan metodologi pengajaran guna memperketat kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Tilaar (2002) pun turut mencatat bahwa kebijakan tersebut membentuk kerangka pendidikan yang hingga kini masih terlihat dalam proses modernisasi dan globalisasi pendidikan di Indonesia. Namun, munculnya tantangan baru ini justru disebabkan oleh warisan kebijakan tersebut, seperti halnya perbedaan dalam penguasaan teknologi pendidikan dan metode pengajaran yang inovatif antara daerah prioritas dengan daerah marginal. Karenanya, meski sudah dibekali dengan landasan institusional yang kuat, namun evaluasi terhadap pengaruh pengadaan guru pada masa orde baru ini tetap perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan pendidikan di masa kini dan masa depan agar kelak senantiasa mampu menjawab berbagai tantangan dan masalah pendidikan kontemporer.

Meski kebijakan pengadaan guru pada masa orde baru telah menciptakan fondasi yang kuat, akan tetapi tantangan tetap terus bermunculan, khususnya dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini. Perubahan teknologi dan globalisasi menuntut adanya penyesuaian dalam metode pengajaran yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh kebijakan masa lalu. Dalam hal ini, Datumula (2020) menyoroti bahwa kebijakan yang sentralistik cenderung menghambat inovasi di bidang pendidikan, khususnya dalam penguasaan teknologi oleh para guru. Keterbatasan ini kemudian menciptakan disparitas yang semakin besar antara wilayah dengan akses lebih baik terhadap teknologi pendidikan dan wilayah tertinggal. Karenanya, meski program pengadaan guru pada masa orde baru berperan aktif dalam menciptakan landasan bagi pendidikan Indonesia, akan tetapi tetap diperlukan pembaruan kebijakan dan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan modern di era digitalisasi saat ini.

Mengaitkan studi-studi sebelumnya dengan fokus penelitian saat ini, jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan konteks dan pendekatan. Seperti halnya studi yang dilakukan oleh Datumula (2020) yang memberikan wawasan historis mengenai perubahan kebijakan dari masa ke masa, dapat dilihat bahwa penelitian ini berbeda dalam hal analisis dampak spesifik dari kebijakan orde baru terhadap sistem pendidikan modern. Nugroho (2017) menilai konstelasi ekonomi, sosia, dan politik era orde baru, yang meski relevan, namun tidak secara khusus membahas aspek pendidikan secara mendalam.

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Tilaar (2002) dan Syaripudin & Nur'aini (2006) cenderung lebih berfokus pada aspek budaya dan landasan pendidikan secara umum tanpa menyelami lebih jauh perihal dinamika kebijakan keguruan. Karenanya, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan terfokus pada bagaimana elemen-elemen tersebut menggabungkan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara sejarah kebijakan dan praktik pendidikan modern, namun juga menawarkan evaluasi kritis dan proyektif terhadap kebutuhan kebijakan di erla globalisasi.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pengadaan guru pada masa orde baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia saat ini berdasarkan atas tiga aspek, yakni kuantitas, kualitas, dan profesionalisme. Memahami konteks sejarah dan evolusi kebijakan pendidikan masa lalu menjadi penting agar dapat Menyusun strategi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pendidikan modern. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang terus berkembang, pengetahuan mengenai kebijakan di masa lampau dapat memberikan wawasan kritis bagi pembuat kebijakan pendidikan kontemporer. Signifikansi penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada terkait dampak spesifik kebijakan orde baru, sehingga dapat memberikan landasan bagi pembaruan kebijakan pendidikan yang lebih efektif. Menilik urgensitasnya, penelitian ini sangat mendesak mengingat transisi menuju pendidikan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman dianggap krusial, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas guru dan pengajaran. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dengan mengevaluasi kebijakan masa lalu dan menawarkan rekomendasi strategis untuk membangun sistem pendidikan dan keguruan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan menelaah lebih dalam kebijakan di masa orde baru, kita dapat lebih bijak dalam merancang kebijakan yang tangguh dan dapat beradaptasi menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

KAJIAN TEORITIS

Teori kebijakan publik merupakan seperangkat konsep serta model yang digunakan untuk memahami, serta merumuskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik, mencakup tentang bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Teori yang digagas oleh Harold Lasswell yang dikenal sebagai Bapak Komunikasi Dunia dan Studi Kebijakan Publik ini menekankan bahwa kebijakan publik harus dipelajari sebagai sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek dan tatanan masyarakat, baik politik, institusi, hingga masyarakat (Lasswell, 1956). Berkaitan dengan konteks sistem pendidikan dan pengadaan guru, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sistem pengadaan guru pada masa orde baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia saat ini yang bisa dikatakan masih ditemukan banyak ketimpangan dan permasalahan.

Berkaitan dengan hubungan antara sistem pendidikan dan pengadaan guru di Indonesia, mekanisme pengadaan guru pada masa orde baru menjadi hal krusial bagi pembangunan pendidikan di Indonesia kala itu, mengingat minimnya jumlah guru menjadi penghambat proses pemerataan pendidikan itu sendiri. Akan tetapi, ketergantungan pada birokrasi secara sentralistik ini menimbulkan tantangan dalam implementasi yang efektif, menyebabkan ketidakcocokan antara kebijakan dan kebutuhan pendidikan lokal (Bjork, 2005). Reformasi pendidikan yang dilakukan tanpa pendekatan yang bersifat adaptif terhadap konteks lokal dan perkembangan global menunjukkan kelemahan kebijakan tersebut, terutama dalam membangun kompetensi pedagogical yang dinamis. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pengadaan guru ini telah meningkatkan angka partisipasi pendidikan, peningkatan secara kuantitatif menjadi tidak efektif tanpa diiringi perbaikan kualitas yang signifikan. Kesadaran terhadap pentingnya peningkatan kualitas melalui pendekatan yang lebih desentralisasi dan responsif baru berkembang pada akhir masa Orde Baru dan era reformasi selanjutnya (Datumula, 2020).

James E. Anderson (1975) memaparkan bahwa fungsi kebijakan publik mencakup lima tahapan penting yang saling berkaitan: agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan ini memiliki peran spesifik dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Berkaitan dengan pengimplementasian kebijakan pengadaan guru selama masa Orde Baru juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam setiap langkah kebijakan publik. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah strategi yang diterapkan mampu mencapai target yang diinginkan, serta untuk melakukan penyesuaian bila diperlukan (Anderson, 1975). Karenanya, evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang positif terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami makna yang diberikan oleh individu dan/atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Creswell, 2018). Sedangkan studi kepustakaan merupakan sebuah proses sistematis yang dilakukan dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis informasi dari sumber tertulis guna menjawab pertanyaan penelitian (Zed, 2008).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen tertulis. Dokumen yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas kebijakan pengadaan guru masa orde baru, peraturan perundang-undangan terkait pendidikan, penelitian terdahulu, dan artikel-artikel ilmiah yang didukung dengan pendapat ahli serta informasi lainnya dari referensi berupa buku dan sebagainya yang membahas dan mengkaji hal serupa.

Keseluruhan data dan dokumen tersebut kemudian dikumpulkan untuk dilakukan analisis secara mendalam menggunakan teknik studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Yang mana analisis data kualitatif dilakukan dengan melakukan pengkajian dan penafsiran data secara lebih lanjut guna memperoleh makna yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam perihal sistem pengadaan guru yang diterapkan pada masa orde baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan pengadaan guru di Indonesia saat ini berdasarkan atas tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan profesionalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pengadaan Guru Masa Orde Baru

Orde baru yang dipimpin oleh Soeharto selaku presiden Indonesia kala itu memiliki peran krusial bagi sektor pembangunan serta perkembangan Indonesia hingga saat ini. Sebagai sosok bapak pembangunan Indonesia , Soeharto banyak menerapkan berbagai macam program guna membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satu program unggulannya ialah Repelita. Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) merupakan sebuah program pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah Indonesia kala itu dalam kurun 5 tahun yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Program Repelita ini pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan orde baru di bawah kekuasaan presiden Soeharto yang dilaksanakan dalam 6 periode dari 1969 hingga 1998 (Suryohadiprojo, 1994).

Setiap Repelita memiliki fokus pembangunannya masing-masing sesuai dengan prioritas nasionalnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Data Target dan Pelaksanaan Repelita

Periode	Kurun Waktu	Target Prioritas Nasional
Repelita I	1969-1974	Pemulihan Ekonomi & Pembangunan Infrastruktur Dasar
Repelita II	1969-1979	1. Ketersediaan bahan, sandang, dan pangan yang cukup 2. Ketersediaan perumahan, dsb 3. Meluasnya sarana dan prasarana 4. Meratanya kesejahteraan rakyat 5. Meluasnya kesempatan kerja
Repelita III	1979-1984	Melakukan pemerataan berlandaskan trilogi pembangunan
Repelita IV	1984-1989	Mengembangkan industry khususnya industri padat karya
Repelita V	1989-1994	Versifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan akan minyak dan gas bumi melalui pengembangan industri ekspor

Repelita VI	1994-tidak selesai	Peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 7% dan serangkaian upaya peningkatan ekonomi lainnya dari tingkat terkecil

Sumber : Rahmawati (2022)

Dalam konteks pendidikan, pelaksanaan Repelita ini memainkan peran penting dalam upaya pengadaan guru dan pembangunan fasilitas sekolah, termasuk program SD Inpres yang mana menjadi salah satu aspek pemenuhan perluasan sarana dan prasarana sebagaimana termaktub dalam tabel di atas pada periode Repelita II. Soeharto menilai bahwa perlu diadakannya pemerataan pendidikan yang layak dan berkualitas guna mendukung tujuannya dalam upaya pembangunan negara, dan untuk mencapai hal ini diperlukan lebih banyak cendekiawan maupun tenaga pengajar yang kompeten. Akan tetapi, tingginya angka buta huruf di Indonesia kala itu di tengah kebutuhan akan tenaga pengajar yang tinggi memicu timbulnya permasalahan baru yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi. Karenanya, Soeharto melancarkan segala macam upaya dalam rangka melakukan pemerataan pendidikan, yakni dengan melakukan pembangunan sarana prasarana pendidikan sebagaimana halnya SD Inpres (Sekolah Dasar Intruksi Presiden) dan Pengadaan Guru secara masif.

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan pemerataan pendidikan di Indonesia (Tilaar, 1995). Meningkatnya jumlah sekolah juga perlu dibarengi dengan peningkatan jumlah tenaga pengajar, karenanya program pengadaan guru menjadi solusi yang diperlukan, khususnya di daerah tertinggal. Tilaar (1995) juga kembali menyoroti bahwa pemerintah kala itu menerapkan kebijakan pengangkatan guru melalui sistem ikatan dinas bagi lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang mewajibkan mereka untuk kemudian mengajar di daerah tertentu pasca kelulusan, yang mana hal ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sistem pengadaan guru bahkan hingga saat ini.

Sayangnya, menjelang berakhirnya masa orde baru, Sekolah Pendidikan Guru (SPG) kemudian ditutup, dan kualifikasi guru kemudian diarahkan ke jenjang pendidikan tinggi agar mutu dan kualitas tenaga pendidik lebih meningkat (Soedijarto, 1993). Meski dinilai baik, akan tetapi sistem ini dinilai masih memerlukan perhatian khusus, mengingat saat ini masih kerap ditemukan berbagai macam masalah dan tantangan baru, terutama dalam hal pendistribusian guru, kesejahteraan tenaga pengajar yang dinilai memperihatinkan, serta kualitas pendidikan di berbagai daerah yang tergolong rendah (Zuhdi, 2018).

Pengaruhnya Terhadap Sistem Pendidikan dan Keguruan Saat Ini

Kebijakan pengadaan guru pada masa orde baru (1966-1998) membawa dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan dan pengadaan guru di Indonesia hingga saat ini. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah kala itu dalam rangka mencapai tujuannya untuk melakukan pemerataan pendidikan, mencakup pendirian sekolah-sekolah keguruan seperti Sekolah Pendidikan

Guru (SPG), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), SD Inpres, dan sederet program lainnya. Kini, strategi yang diterapkan tersebut memberikan dampak jangka panjang terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia, hal ini sebagaimana dapat dilihat berdasarkan 3 aspek utama, yakni : Kuantitas, Kualitas, dan Profesionalisme Guru.

1.1. Kuantitas : Peningkatan Jumlah Guru dan Akses Pendidikan

Selama orde baru, pemerintah secara agresif memperluas akses pendidikan melalui program wajib belajar 6 tahun (1973) dan 9 tahun (1994) serta mendirikan banyak Sekolah Dasar Inpres (SD Inpres). Adapun pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan lain, diantaranya :

a. Pendirian Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebagai jalur utama perekrutan guru SD.

b. Rekrutmen massal guru guna memenuhi kebutuhan pengajar di daerah terpencil dalam upaya praktik pemerataan pendidikan yang berkualitas, mengingat sulitnya akses masyarakat di daerah dan tempat terpencil akan pendidikan maupun hal lainnya.

Kebijakan ini pun memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia saat ini, sebagaimana berikut :

a. Per tahun 2023, Kemendikbudristek mencatat bahwa terdapat sebanyak lebih dari 3 (tiga) juta guru aktif di semua jenjang pendidikan.

b. Distribusi guru untuk daerah terpencil masih mengalami kendala sehingga tenaga pengajar di daerah terpencil cenderung sedikit (Suryanto, 2018). Rendahnya jumlah tenaga pengajar di daerah terpencil ini memang masih menjadi sebuah permasalahan serius dari masa ke masa yang disebabkan oleh beberapa faktor, dimana pada masa orde baru, tidak meratanya pendistribusian tenaga pengajar dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan di luar Jawa, sehingga guru-guru enggan untuk ditempatkan di daerah-daerah pedalaman tersebut, hal ini juga didukung oleh minimnya upah dan rendahnya dukungan pemerintah daerah (Suryadi, 2000). Sedangkan pada masa ini, rendahnya jumlah tenaga pengajar di daerah terpencil umumnya disebabkan oleh pemerintah yang jarang memperhatikan tingkat kesejahteraan guru, minimnya akses transportasi, hingga buruknya fasilitas dasar seperti listrik dan internet (Raihani, 2011).

Akan tetapi, peningkatan jumlah guru yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas guru telah berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya hasil belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran yang membutuhkan kompetensi guru yang tinggi seperti halnya matematika, sains, hingga bahasa inggris.

1.2. Kualitas : Dampak terhadap Kompetensi Guru

Mulanya pemberlakuaan rencana pemerataan pendidikan pada masa orde baru ini di titikberatkan pada peningkatan jumlah guru, namun aspek kualitas belum menjadi fokus dan permasalahan utama. Seringkali, guru hanya dibekali dengan pelatihan singkat tanpa memiliki latarbelakang akademik dan kependidikan yang kuat. Karenanya, diperlukan program pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas guru, beberapa hal yang kemudian diterapkan pada masa orde baru untuk meningkatkan kualitas guru ini terdiri atas :

a. Program pelatihan massal guna meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.

b. Standarisasi kurikulum pendidikan guru melalui SPG dan PGSD sebagai jalur utama pendidikan guru.

Kini, apa yang dilakukan pada masa orde baru dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru pun menjadi hal yang turut memberikan dampak berkelanjutan bagi sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia saat ini, yakni :

a. Muncul kebutuhan peningkatan kualitas guru yang kini diwujudkan melalui kebijakan sertifikasi guru dan program khusus, yaitu Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sejak 2005 silam (Suhadi, 2020), hal ini sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).

b. Terus dilakukannya evaluasi dan inovasi terhadap standar kompetensi guru, namun memang masih terdapat disparitas kualitas antara guru di perkotaan dan pedesaan.

1.3. Profesionalisme : Dari Pegawai Negara ke Profesi yang Mandiri

Pada masa orde baru, tenaga pengajar (guru) diposisikan lebih sebagai seorang pegawai negara daripada sebagai tenaga profesional mandiri. Status guru sebagai PNS memberikan beberapa dampak krusial terhadap penerapan pembelajaran, diantaranya yaitu :

a. Ketergantungan pada kebijakan negara, terutama dalam aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.

b. Kurangnya kebebasan akademik, guru harus serta merta mengikuti kebijakan, peraturan, dan arahan kurikulum yang ketat dalam proses belajar-mengajar tanpa adanya inovasi yang bermakna.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, sektor pendidikan di Indonesia saat ini telah melakukan cukup banyak evaluasi atasnya, akan tetapi dampak daripada hal tersebut masih dapat dirasakan hingga kini, diantaranya ialah sebagai berikut :

a. Reformasi pendidikan pasca Orde Baru berusaha meningkatkan profesionalisme guru melalui sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga kebijakan merdeka belajar guna memberikan dan mengekspresikan kebebasan akademik (Nugroho, 2021).

b. Guru mulai memiliki kemandirian profesional, namun masih tetap ditemukan beberapa tantangan khususnya pada aspek kesejahteraan dan peningkatan kapasitas di era yang serba digital seperti saat ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kebijakan pengadaan guru masa orde baru dan pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak berkepanjangan hingga saat ini. Pemerintah masa Orde Baru telah berupaya untuk meningkatkan kuantitas guru, namun perlu kiranya untuk turut diimbangi dengan peningkatan kualitas yang mumpuni. Secara kuantitas, jumlah guru memang mengalami peningkatan signifikan, namun permasalahan terkait pendistribusian guru khususnya di daerah terpencil perlu untuk diperhatikan lebih dalam lagi. Sehingga, diperlukan upaya guna meningkatkan distribusi guru secara merata serta meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil. Sedangkan, secara kualitas masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui program pelatihan maupun sertifikasi khusus lainnya. Standarisasi kurikulum pun perlu untuk terus ditingkatkan guna memastikan bahwa guru memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan zaman, sama halnya dengan standar kompetensi guru yang perlu untuk diberikan evaluasi dan inovasi lebih lanjut guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Secara profesionalisme, guru perlu diberikan kemandirian profesional yang lebih besar dan kebebasan akademik lebih luas. Reformasi pendidikan pasca masa orde baru telah

dilakukan guna peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Namun, masih ditemukan permasalahan dan tantangan khususnya perihal kesejahteraan dan peningkatan kapasitas guru di era digital dan globalisasi seperti saat ini. Sebagai saran, pemerintah perlu untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi terhadap kebijakan pengadaan guru guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan distribusi guru secara merata, kualitas guru di wilayah terpencil, hingga peningkatan profesionalisme guru melalui kebebasan akademik dan kemandirian profesional pun menjadi hal yang krusial untuk dijadikan sebagai fokus utama dalam rangka meningkatkan sistem pendidikan dan keguruan di tanah air.

Terakhir, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan pada hasil penelitian ini, terutama mengenai kondisi pendidikan di daerah terpencil dari masa ke masa serta bagaimana perkembangan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga pengajar dari masa orde baru hingga saat ini yang kerap kali dirasa kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga banyak dari mereka yang enggan untuk mengabdi dan mengajar di daerah-daerah terpencil, hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis dalam mencari dan menemukan sumber dan referensi yang membahas perihal terkait secara jelas. Untuk itu, penulis berharap agar kedepannya baik penulis maupun peneliti lainnya dapat dan/atau memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Selain itu, penulis juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi khazanah pendidikan dan keilmuan, terutama perihal penerapan pengadaan guru pada masa orde baru serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan dan keguruan di Indonesia hingga saat ini.

DAFTAR REFERENSI

Anderson, J.E. (1975). Public Policymaking. New York : Praeger.

Arista Oktaviani, Yeni. (2015). *Kebijakan Pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Implementasinya di Yogyakarta Tahun 1967-1990*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Bjork, Christopher. (2005). "Indonesian Education: Teachers, Schools, and Central Bureaucracy." Routledge.

Creswell, J. W. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(2), 56-78.

Datumula, Sarfika. (2021). *Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja*. Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, 1(2), 56-78.

Dye, T.R. (2017). Understanding Public Policy. Boston : Pearson.

Kemendikbudristek. (2023). Laporan Statistik Pendidikan Nasional. Jakarta : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process : Seven Categories of Functional Analysis. College Park : University of Maryland Press.

Lindblom, C.E. (1959). The Science of Muddling Through. Public Administration Review, 32 (4), 298-310.

Ningrum, S. U. D. (2023). Kebijakan Pemerintah Orde Baru dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di Indonesia. *Lembaran Sejarah*, *19*(1), 58-77.

Nugroho, R. (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia : Dari Orde Baru ke Era Digital. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Nugroho, Wahyu Budi. (2017). *Konstelasi Ekonomi, Sosial, dan Politik di Era Orde Baru*. Makalah disampaikan dalam peringatan "19 Tahun Reformasi" yang diselenggarakan oleh BEM-PM Universitas Udayana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada 27-28 Mei 2017.

Rahmawati, Rizki. (2022). Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru. Jurnal Ilmiah Kebudayaan Kesejarahan. 9(2), 38-42.

Raihani. (2011). *Education Reform in Indonesia.* Singapore : Springer.

Ramaditya, Harif Nurwahyu. (2020). *Kompetensi Profesional Guru dalam Dinamika Politik 1962-1974*. Skripsi S1 Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.

Said, Muh., & Affan, Junima. (1999). *Mendidik dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Jemmars.

Soedijarto. (1993). Pendidikan dalam pembangunan nasional : Dari orde baru sampai reformasi. Jakarta : Gramedia.

Suhadi, M. (2020). Implementasi Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Jurnal Pendidikan Nasional, 7(2), 45-58.

Suryadi. (2000). Pendidikan di Indonesia : Masalah dan Agenda Reformasi. Jakarta : Grasindo.

Suryohadiprojo, S. (1994). Ekonomi Pembangunan : Teori dan kebijakan. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Syaripudin, Tatang, & Nur'aini. (2006). *Landasan Pendidikan*. Bandung: UPI PRESS.

Tilaar, H.A.R. (1995). Membenahi pendidikan nasional : Pembangunan manusia Indonesia menuju 2020. Jakarta : Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zuhdi, M. (2018). Pendidikan di Indonesia : Dari masa ke masa. Jakarta : Kompas.